

## PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN

Periode Penerapan : Tahun 2020

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi Hukum Dengan Tersedianya Kelengkapan Database Peraturan Perundang-undangan dan Pustaka Digital Didukung Anggota JDIHN	Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam sistem jaringan informasi hukum nasional	Belum seluruhnya Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi
			Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional	Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik

**DAFTAR RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN**  
**Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam sistem jaringan informasi hukum nasional	Belum seluruhnya Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terintegrasi	Kurangnya pemahaman Anggota terkait JDIH dan tindak lanjut dalam pengelolaannya	Pusat DJIHN	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	Internal, Eksternal	C	pengelolaan dan pengintegrasian JDIH terhambat	Pusat DJIHN, Anggota JDIHN dan Masyarakat	PERPRES No.33 Tahun 2012	Belum semua Anggota JDIH dan masyarakat memahami pentingnya dan manfaat JDIH	
			Kebijakan Pimpinan kurang mendukung JDIH	Pusat DJIHN	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungannya	Internal, Eksternal	C	JDIHN belum terwujud	Pusat DJIHN, Anggota JDIHN dan Masyarakat	PERPRES No.33 Tahun 2012	tidak terlaksananya amanat PERPRES No. 33 Tahun 2012	
			Belum terwujudnya Database Hukum Nasional	Pusat DJIHN	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	Internal, Eksternal	C	belum semua Database Anggota JDIHN terintegrasi	Pusat DJIHN, Anggota JDIHN dan Masyarakat	Standar dan Teknis Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum	Implementasi Standar dan Teknis Pengolahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Anggota JDIHN	
2.	Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem	Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik	Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum	Pusat DJIHN	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	Internal	C	Pencarian informasi dan dokumen hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	SOP dan Reviu	Dukungan anggaran yang belum maksimal	
			Belum dilakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan	Pusat DJIHN	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	Internal	C	Masyarakat kesulitan mendapatkan peraturan perundang-undangan secara cepat	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	SOP	Kebijakan pimpinan yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan inventarisasi	
			Belum adanya Database Dokumen Hukum yang lengkap	Pusat DJIHN	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	Internal	C	Pencarian informasi dan dokumen hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Diklat dan Kerjasama	Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan dokumen hukum	
			Perangkat Pendukung Pengolahan dokumen dan informasi hukum belum cukup memadai	Pusat DJIHN	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Internal	C	Pemberian Pelayanan Dokumen dan Informasi Hukum belum maksimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Realisasi terkait Penganggaran Pembelian Perangkat Pendukung setiap tahunnya sesuai dengan Kebutuhan	Kesiapan SDM dalam mengoperasikan perangkat pendukung	
			Pengadaan Koleksi Dokumen Hukum belum sesuai dengan kebutuhan	Pusat DJIHN	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	Eksternal	C	Koleksi Dokumen Hukum yang dilyangkan belum optimal	BPHN, Kementerian dan Masyarakat	Mekanisme Pembelian Koleksi dibuat per satuan kegiatan bukan paket	belum terpenuhinya kebutuhan koleksi dokumen hukum	

**PETA RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN**

**Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Belum semua Anggota JDIH dan masyarakat memahami pentingnya dan manfaat JDIH	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
2	tidak terlaksananya amanat PERPRES No. 33 Tahun 2012	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
3	Implementasi Standar dan Teknis Pengolahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Anggota JDIH	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Orange
4	Dukungan anggaran yang belum maksimal	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
5	Kebijakan pimpinan yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan inventarisasi	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
6	Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan dokumen hukum	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
7	Kesiapan SDM dalam mengoperasikan perangkat pendukung	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
8	belum terpenuhinya kebutuhan koleksi dokumen hukum	Moderat	3	Unit Eselon I	4	12	Kuning

## INDIKATOR RISIKO

**Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN**

**Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Belum semua Anggota JDIH dan masyarakat memahami pentingnya dan manfaat JDIH	20	1	14	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	6
2	tidak terlaksananya amanat PERPRES No. 33 Tahun 2012	20	1	10	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungannya	10
3	Implementasi Standar dan Teknis Pengolahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Anggota JDIHN	20	1	12	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8
4	Dukungan anggaran yang belum maksimal	15	1	3	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	12
5	Kebijakan pimpinan yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan inventarisasi	15	1	10	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	5
6	Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan dokumen hukum	15	1	10	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	5
7	Kesiapan SDM dalam mengoperasikan perangkat pendukung	15	1	11	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	4
8	belum terpenuhinya kebutuhan koleksi dokumen hukum	12	2	8	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	4

**RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN**

**Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	6	Mengurangi Risiko	Memperluas media sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	media sosialisasi (facebook, twitter, youtube, instagram, line, whatsapp)	6	Februari s.d. November	Pusat DJIHN	
2	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungannya	10	Mengurangi Risiko	Meningkatkan Koordinasi	Koordinasi (koordinasi dilakukan melalui forum kegiatan, surat menyurat, korespondensi telp, undangan APEC. Exclude K/L/LPNK)	34	Februari s.d. November	Pusat DJIHN	
3	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8	Mengurangi Risiko	Menyelenggarakan Bimtek/Pendampingan di 8 Provinsi mengenai Standar Teknis dan Standar Metadata Website JDIH serta Pengintegrasian dengan website DJIHN Pusat	Laporan Hasil Bimtek/Pendampingan	8	Februari s.d. November	Pusat DJIHN dan BPSDM	
4	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	12	Mengurangi Risiko	Melakukan program digitalisasi dokumen hukum	dokumen hukum	200	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	
5	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	5	Mengurangi Risiko	Melakukan inventarisasi database perundang-undangan	hasil inventarisasi	30000	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	
6	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	5	Mengurangi Risiko	Melakukan pelatihan pengelolaan dokumen hukum	pengelola dokumen hukum yang berkualitas	12	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	-
7	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	6	Mengurangi Risiko	Melakukan pengusulan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Pengadaan Perangkat (PC untuk Pelayanan dan Pengolahan, Mesin fotocopy, printer dan Scanner, wifi dan akses internet untuk pengunjung, fasilitas ruang koleksi dan baca seperti; ac, furniture, pengatur suhu ruangan, rak buku, dll)	1	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	
8	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	4	Mengurangi Risiko	Memperbaiki mekanisme pembelian pengadaan koleksi dokumen hukum	Penambahan jumlah volume paket pembelian	12	Jan s.d Desember	Pusat DJIHN	

**PEMANTAUAN RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko : JDIH BPHN**

**Periode Penerapan : Tahun 2020**

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Memperluas media sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	media sosialisasi (facebook, twitter, youtube, instagram, line, whatsapp)	6	6	100,0	terbatasnya Sosialisasi ke anggota JDIH dan masyarakat	6,0	6,0	100,0	0,0	
2	Meningkatkan Koordinasi	Koordinasi (koordinasi dilakukan melalui forum kegiatan, surat menyurat, korespondensi telp, undangan APEC. Exclude K/L/LPNK)	34	34	100,0	pimpinan kurang memahami pentingnya JDIH dilingkungkannya	10,0	9,8	98,0	0,2	
3	Menyelenggarakan Bimtek/Pendampingan di 8 Provinsi mengenai Standar Teknis dan Standar Metadata Website JDIH serta Pengintegrasian dengan website JDIHN Pusat	Laporan Hasil Bimtek/Pendampingan	8	8	100,0	belum seragamnya pengolahan Database Dokumen Hukum	8,0	7,8	97,5	0,3	
4	Melakukan program digitalisasi dokumen hukum	dokumen hukum	200	200	100,0	Belum seluruhnya dokumen hukum terdigitalisasi	12,0	9,2	76,3	0,7	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
5	Melakukan inventarisasi database perundang-undangan	hasil inventarisasi	30000	30000	100,0	Belum semuanya peraturan perundang-undangan terinventarisasi	5,0	3,5	70,4	3,0	
6	Melakukan pelatihan pengelolaan dokumen hukum	pengelola dokumen hukum yang berkualitas	500	450	90,0	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola dokumen hukum	5,0	3,0	60,6	3,9	
7	Melakukan pengusulan anggaran untuk pengadaan perangkat pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	Pengadaan Perangkat (PC untuk Pelayanan dan Pengolahan, Mesin fotocopy, printer dan Scanner, wifi dan akses internet untuk pengunjung, fasilitas ruang koleksi dan baca seperti; ac, furniture, pengatur suhu ruangan, rak buku, dll)	6	4	66,7	Kurangnya Dukungan Anggaran dalam pengadaan Perangkat Pendukung pengolahan dokumen dan informasi hukum	4,0	1,8	45,8	6,0	
8	Memperbaiki mekanisme pembelian pengadaan koleksi dokumen hukum	Penambahan jumlah volume paket pembelian	4	1	25,0	Pihak Penyedia Bahan Koleksi Dokumen Hukum tidak selalu bisa memenuhi setiap judul pembelian	4,0	1,0	25,0	6,0	